

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat Hukum (Edisi Lengkap) dari Klasik sampai postmodernisme, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta

Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung,

Rahardjo, Satjipto, 2010, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Yogyakarta

\_\_\_\_\_, 2012, Hukum Progressif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia Genta Publishing, Genta Publishing, Yogyakarta

Santoso, M. Agus, 2014, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.Kedua, Kencana, Jakarta,

Sholahudin, Umar, 2021, Hukum dan Keadilan Masyarakat : Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, Setara Press, Malang,

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tingkat Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Suadi, Amran, 2021 Sosiologi Hukum : Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum, Kencana,

Tanya, Bernard L, 2019, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta

Mamudji, Sri, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung

### B. JURNAL PENELITIAN DAN ARTIKEL

Apriyanto, M., Arpah, M., & Jumaidi, A. (2019). Analisis Kesiapan Petani Swadaya dalam Menghadapi Rancangan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan ditinjau dari Aspek Status Lahan, Legalitas dan Sumber Bibit di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.32520/jtp.v8i1.970>

- Nurhaliza, Rosnita, & Dewi, N. (2021). Peran Penyuluh dalam Penerapan ISPO pada Petani Kelapa Sawit Swadaya di Kabupaten Kampar. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 14(2), 311–318. <https://doi.org/10.19184/jsep.v14i3.25705>
- Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2018). The disciplining of illegal palm oil plantations in Sumatra. *Third World Quarterly*, 39(5), 920–940. <https://doi.org/10.1080/01436597.2017.1401462>
- Vicki, Nurliza, & Dolorosa, E. (2021). Niat Perilaku Petani Sawit Swadaya dalam Peningkatan Usaha Bekelanjutan di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 18(1), 112–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/sepa.v18i1.48546>
- Wicaksono, D. A., Rifin, A., & Pahan, I. (2018). The Sustainability of Three Indonesian Palm Oil Business Entities. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 15(3), 249–257. <https://doi.org/10.17358/jma.15.3.249>
- Pramudya, E.P.; Wibowo, L.R.; Nurfatriani, F.; Nawireja, I.K.; Kurniasari, D.R.; Hutabarat, S.; Kadarusman, Y.B.; Iswardhani, A.O.; Rafik, R. Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. *Land* 2022, 11, 576. <https://doi.org/10.3390/land11040576>

### **C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations *Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)* dan termasuk dalam negara Non-Annex I, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Lembaran *Negara* Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Petani, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433

Undang-Undang No 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655

Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75,

Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024

Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1377

Keputusan Menteri Pertanian No. 883 Tahun 2019 tentang Penetapan Luas Tutupan Kelapa Sawit Indonesia 2019

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 tentang Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

#### **D. Internet**

Uni Eropa Atur Komoditas Impor Mencegah Deforestasi, Forest Digest, <https://www.forestdigest.com/detail/1854/deforestasi-uni-eropa> diakses pada tanggal 15 Juli 2022;

Direktorat Jenderal Perkebunan, Peluang Ekspor Perkebunan Masih Bertahan <https://ditjenbun.pertanian.go.id/2020/>

Yulianto, “Penting, Peran Penyuluh Dampingi Pekebun Rakyat Penuhi ISPO”, <https://tabloidsinartani.com/detail//indeks/kebun/22194-Penting-Peran-Penyuluh-Dampingi-Pekebun-Rakyat-Penuhi-ISPO>

Fahamsyah, Ermanto, “Opini: Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO” <https://www.bpdp.or.id/opini-perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-ispo>

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, <https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2022/08/STATISTIK-UNGGULAN-2020-2022.pdf>

Insi Nantika Jelita, Pajak Sawit Rp20 Triliun Setahun Serap 16,2 Juta Pekerja. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/460747/pajak-sawit-rp20-triliun-setahun-serap-162-juta-pekerja> diakses pada 4 Oktober 2022.

Tim Publikasi Katadata. “2,7 Juta Petani Bergantung pada Perkebunan Sawit Rakyat”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/06/27-juta-petani-bergantung-pada-perkebunan-sawit-rakyat> diakses pada 4 Oktober 2022

Gapki: Keputusan Keluar dari RSPO dan Tentukan Standar Minyak Sawit Sendiri Tepat! <https://ekonomi.republika.co.id/berita/1sl233/gapki-keputusan-keluar-dari-rspo-dan-tentukan-standar-minyak-sawit-sendiri-tepat>